



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. A. Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Kelurahan Kasongan Lama
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos : 74411
Website : <https://bkad.katingankab.go.id> Email bkadkatingan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN
Nomor : 900.1.3.3 / 05 / BKAD-1/ I / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan (PP) di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan untuk Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor : 000.3.5/39/BPBJ-01/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 Perihal : Penyampaian Rekomendasi Pejabat Pengadaan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 79);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 692);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 734);
22. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Petunjuk Teknis Pengukuran Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 745);
23. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 810);
24. Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 787);
25. Peraturan Bupati Katingan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 792);
26. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822);

27. Keputusan Bupati Katingan 100.3.3.2/1 Tahun 2025 tentang Penetapan Para Pejabat yang Ditunjuk dan Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
29. Surat Sekretariat Daerah Nomor : 000.3.5/39/BPBJ-01/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 Perihal : Penyampaian Rekomendasi Pejabat Pengadaan Tahun Anggaran 2025.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengadaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

N o	Nama/ Pangkat/ NIP	Jabatan	Jabatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Ket.
1.	ANGELIA LAURA CHRISTAVENI, ST 19900528 201503 2 004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	Pejabat Pengadaan di BKAD	

KEDUA : Pegawai tersebut dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat Pengadaan (PP).

KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal 14 Januari 2025



Kepala Badan
Selaku Pengguna Anggaran,

TOTO JAYA, S.Pi

Rebina Tingkat I / IV.b

NIP. 19720229 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
Up. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Katingan
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.